

SALING KETERGANTUNGAN DAN KETIMPANGAN DALAM TATA EKONOMI POLITIK DUNIA

Hotrun Siregar

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
E-mail: hotrunsiregarapahu@gmail.com

ABSTRAK

Deskripsi ini mencoba memahami kerangka dan struktur ekonomi politik global dengan perspektif sistem ekonomi dunia. Pokok dari sistem ekonomi politik global adalah saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu negara dengan negara lain. Interdependensi-yang dipandang sebagai relasi yang saling membutuhkan dan menguntungkan-justru berubah wujud menjadi ketergantungan sepihak bahkan eksploitatif sifatnya. Hegemoni negara maju terhadap lembaga-lembaga ekonomi dan moneter internasional menjadi penting untuk dijelaskan. Sebab, penguasaan secara sepihak atas lembaga-lembaga tersebut justru kemudian mempermanenkan interalasi-asimetrik dalam tata ekonomi politik global.

Pendahuluan

Timbulnya semangat internasionalisme baru (*new international spirit*) pasca Perang Dunia (PD) II seolah memberi harapan akan tumbuhnya suatu sistem ekonomi global untuk kepentingan dunia. Lembaga-lembaga internasional, seperti *International Monetary Found* (IMF), *International Bank for Reconstruction Develiopment* (IBRD) GATT (sekarang *World Trade Organization-WTO*) dibentuk dengan tujuan: (1) membantu membangun kembali negara-negara yang hancur dalam perang dunia II; (2) mencegah kambuhnya penyakit ekonomi internasional sebelum perang; dan (3) membangun serta mengembangkan ekonomi dunia (A. Hasnan Habib: 1997, 373).

Peter Drucker mengemukakan ciri-ciri utama ekonomi dunia yang sudah mengalami transformasi perubahan, yakni: 1) komoditi primer terlepas dari ekonomi industri; 2) dalam ekonomi industri itu sendiri, produksi mulai terlepas dari tenaga kerja; dan 3) arus modal sudah menjadi motor dan daya penggerak utama dari ekonomi dunia, dan bukan lagi perdagangan dan jasa (Peter Drucker: 1992, 21).

Dunia kontemporer menunjukkan bahwa urusan suatu negara juga merupakan urusan negara lain yang sudah bersifat interdependen secara global. Tidak hanya dibidang tertentu tetapi semua aspek termasuk relasi ekonomi, bisnis dan moneter telah terintegrasi dalam sebuah sistem saling ketergantungan. Hubungan kausalitas ini yang kadang sulit bagi sebuah negara untuk menyelesaikan persoalan di dalam negaranya sendiri manakala negara tersebut mengalami persoalan ekonomik, terutama negara-negara dengan kemampuan ekonomi relatif masih berkembang dianjurkan untuk bertindak secara global.

Kecenderungan dan perkembangan global juga dimaknai sebagai interaksi yang saling mempengaruhi satu negara dengan negara lain, tidak ada negara yang dapat menghindarinya kecuali barangkali negara yang bertekad mengasingkan diri, atau “ bertapa” di suatu tempat yang jauh dari konstelasi politik dunia, itupun kalau dapat ditemukan tempat seperti itu. Sesungguhnya globalisme itu berintikan saling ketergantungan dan keterkaitan, atau interdependensi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain dan antara negara dengan negara lain (Hasnan Habibi: 1997, 373). Interdependensi negara-bangsa yang dikemas dalam bingkai sistem ekonomi politik global telah memaksa negara-negara dengan kapabilitas yang relatif lemah untuk tunduk dalam irama dan aturan sistem raksasa tersebut.

Dalam prakteknya, tidak ragu untuk dinyatakan bahwa perdagangan bebas selalu menguntungkan negara-negara maju. Dalam rangka memperluas pasar bagi barang-barang industri yang dihasilkannya, negara-negara maju terus-menerus berusaha mencari sasaran-sasaran baru di manapun di seluruh dunia. Inilah gerak globalisasi yang tidak ingin lagi dihambat oleh batas-batas negara atau yang dikenal dengan istilah *borderless world*.

Tata kelola ekonomi dunia ke depan diprediksi akan jauh lebih terbuka pasca 20 negara yang sepakat membentuk G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat (AS) pada akhir September 2009 lalu. Disatu sisi banyak pihak yang sangat optimis lahirnya G-20 akan membawa kebangkitan dunia perdagangan dan investasi untuk mengembalikan pertumbuhan

ekonomi global. Sementara di sisi lain, kelahirannya juga merupakan pengakuan atas kegagalan tata kelola ekonomi dunia di bawah G-8 (yang akan tetap eksis walau fokusnya ke depan non ekonomi). G-20 akan menggantikan peran ekonomi G-8, menyumbang 90 persen terhadap produk domestik bruto dunia, sekitar 60 triliun dollar AS. Terdiri dari AS, EU27, Jepang, China, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Brazil, Kanada, India, Rusia, Meksiko, Australia, Korea, Turki, Indonesia, Argentina, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. G-20 diharapkan akan mengubah elite dunia, yang sebelumnya didominasi negara-negara kaya menjadi kelompok elite dengan kombinasi negara kaya dan negara berkembang dengan prospek lebih cerah.

Berbagai kalangan yang menyambut positif lahirnya G-20 ini didasarkan pada argumen bahwa negara berkembang kini bisa langsung menyuarakan kepentingannya di forum informal semacam ini. Hal ini tentunya jauh berbeda jika dibandingkan dengan apa yang terjadi selama ini dimana negara berkembang sekadar menjadi penonton dan objek dari negara-negara kaya di G-8. Komunike pemimpin G-20 (sebuah organisasi informal baru menggantikan G-8) juga berharap bahwa G-20 akan melawan proteksionisme. Gejala semacam ini menguat di Uni Eropa dengan makin terbatasnya akses pasar ke AS dan negara lain.

Dalam hal jalan penyelesaian krisis *financial* yang diambil tetap sama, yaitu memperluas investasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan bebas. Demikian halnya jalan bagi penyelesaian krisis lingkungan yang bertumpu pada tiga hal, investasi teknologi baru, perdagangan karbon dan peningkatan utang luar negeri bagi negara-negara berkembang dalam rangka melakukan mitigasi dan adaptasi skema penyelesaian krisis perubahan iklim. Cara-cara neoliberalisme yang konservatif dan usang terus dipertahankan yang sudah pasti akan memperparah keadaan ([http://www. Globaljustice.org](http://www.Globaljustice.org)).

Itu sebabnya, kapabilitas negara berkembang tampaknya terus menjadi sorotan dan persoalan ketika dihadapkan pada *fully competitive* yang menjadi filosofi dasar ekonomi klasik. Sebab, salah satu konsekuensi penting dari perekonomian dunia adalah berkembangnya sistem pembagian kerja yang diatur sedemikian rupa dimana negara maju berkonsentrasi memproduksi barang dan industri berat yang padat modal dan teknologi, sementara negara berkembang memproduksi bahan mentah, produk pertanian dan industri ringan. Akibatnya terjadi kesenjangan pendapatan nasional antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang (Bob Sugeng Hadiwinata: 2002, 31).

Deskripsi di atas mendorong munculnya sejumlah pertanyaan terkait dengan bagaimana pola dan struktur sistem dunia itu bekerja dalam arti mekanisme yang berlaku memberi manfaat bagi negara-negara di dalam sistem tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap negara-negara dengan fundamental ekonomi yang relatif lemah, bagaimana peran lembaga-lembaga internasional dalam menjaga stabilitas sistem. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan fokus yang akan dijelaskan dalam tulisan sederhana ini.

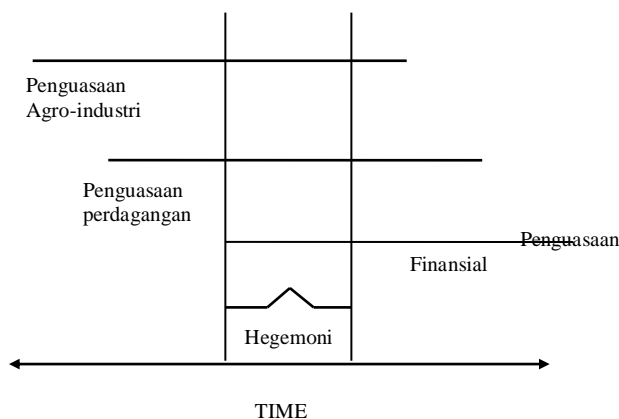
World System Theory

Adalah Immanuel Wallerstein seorang tokoh intelektual penting yang merumuskan Teori Sistem Dunia-*World System Theory* pada akhir dekade 1970-an sekaligus menempatkan dirinya satu kubu dengan pencetus Teori Ketergantungan, seperti Andre Gunder Frank. Wallerstein mengawali uraiannya bahwa pada mulanya dunia ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil dan bentuk pemerintahan lainnya, dan sistem dunia belum ada pada saat itu. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian bergabung dalam sistem yang lebih besar setelah melalui proses, baik secara damai maupun melalui perang. Bentuk gabungan-gabungan itu cukup besar dibanding dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Meskipun kekuasaannya tidak mencakup seluruh dunia, namun ia sudah memiliki kekuatan mengendalikan wilayah kekuasaannya secara politis (Immanuel Wallerstein: 1984, 1).

Sejalan dengan itu, Blomstorms dan Hettne menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi merupakan penyebab munculnya sistem perdagangan dunia yang kemudian membawa negara-negara ke dalam sistem yang menyatu. Jika kerajaan-kerajaan sebelumnya menguasai kawasannya melalui kekuasaan politik, maka dalam sistem perekonomian dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di seantero dunia (Magnus Blomstroms & Bjorn Hettne:1984, 181).

Wallerstein menjelaskan tiga cara yang dapat ditempuh dalam upaya memperoleh hegemoni tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.

Gambar 1.
Posisi Kekuatan Hegemoni



Sumber: Immanuel Wallerstein, *The Politics of the World -Economy, the State, the Movements, and the Civilizations*, Cambridge University Press), 1984, hlm.40.

- (1) Hegemoni berhubungan dengan upaya mencapai keuntungan dalam tiga bidang kegiatan ekonomi yaitu, agro industri, perdagangan dan keuangan. Perolehan penguasaan dalam tiga faktor itu sifatnya simultan yang dapat dicapai dalam jangka pendek.
- (2) Hegemoni juga berhubungan dengan ideologi dan politik. Dengan antusias mereka mendorong pelaksanaan liberalisasi global, arus faktor produksi (barang, modal, dan buruh) dijamin kebebasannya melalui sistem ekonomi dunia. Oleh karena itu, prinsip-

prinsip merkantilis dan politik birokrasi harus dihapus, sementara kebebasan masyarakat sipil ditegakkan. Oleh karena prinsip-prinsip itu harus diberlakukan secara umum, maka pada saat tertentu mereka tidak segan melakukan intervensi ke negara lain yang dianggap merugikan kepentingannya.

- (3) Pengembangan kekuatan militer secara global juga dianggap faktor penting guna mencapai hegemoni. Sebab, kekuatan militer bisa digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan kepentingan ekonomi dalam sistem ekonomi global.

Wallerstein kemudian membuat hirarki negara-negara dalam sistem ekonomi dunia. Negara-negara itu sendiri dikelompokkan dalam tiga tingkatan pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran (Wallerstein: 1984, 50-51). Ketiga kelompok itu secara prinsip memiliki perbedaan kekuatan ekonomi dan politik. Negara-negara pusat otomatis berada pada posisi yang paling kuat karena kelompok ini dapat memanipulasi sistem dunia pada batas-batas tertentu, sehingga ia dapat mengambil keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan negara-negara setengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling di eksploitasi atau dirugikan.

Dalam sistem ekonomi dunia tidak ada kekuatan yang konstan. Oleh karena itu, masing-masing pihak bisa mengalami naik turun tingkat. Misalnya, dari posisi yang paling kuat ke posisi yang paling lemah, atau sebaliknya. Prosesi kenaikan kelas negara pinggiran dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga strategi (Arief Budiman: 1995, 110) :

- (1) Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang ada. Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada satu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali; dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara-negara yang sudah terdesak mengambil tindakan berani untuk mulai melakukan industrialisasi

substitusi impor sendiri. Dalam Kriteria ekonomi, ada kemungkinan negara ini naik tingkat dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.

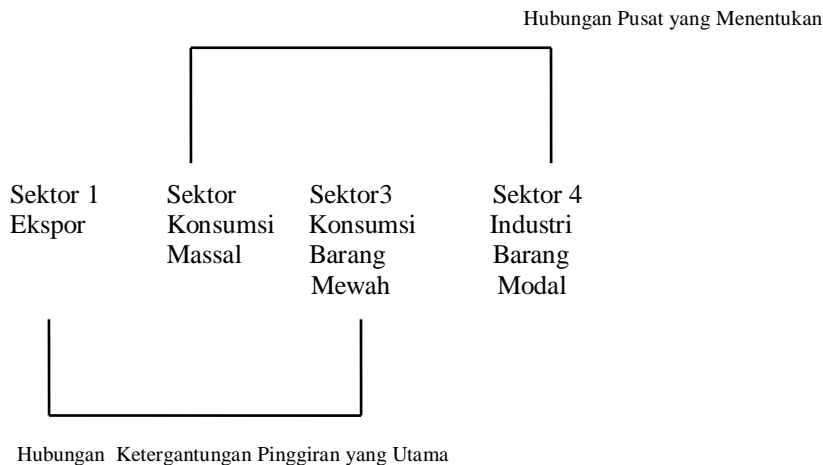
- (2) Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan raksasa di negara-negara pusat melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang. Akibatnya dari perkembangan ini muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang di undang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerjasama.
- (3) Kenaikan kelas terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk mendirikan negaranya. Kalau berhasil, negara-negara ini bisa naik kelas menjadi negara setengah pinggiran.

Meskipun demikian, Wallerstein tidak mengingkari kelemahan-kelemahan yang sudah melekat di dalam tubuh negara-negara marjinal. Negara-negara tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan arus komoditi, modal, dan buruh, baik di dalam negaranya sendiri maupun di dalam sistem kapitalis dunia. Lebih parah lagi, negara-negara pinggiran itu hanya memiliki kemampuan sebagai fasilitator dari arus sumber-sumber produksi yang dihasilkan oleh negara-negara industri.

Realitas ini sesungguhnya tidak berbeda dengan gambaran Samir Amin sebagaimana tampak dalam gambar 2 yang menjelaskan model pembangunan di negara-negara pusat dan negara-negara pinggiran (Blomstorms & Hettne: 1984, 143). Kegiatan di negara-negara pinggiran hanya melakukan ekspor dan mengkonsumsi barang-barang mahal dan barang-barang mewah. Sedangkan di negara pusat, disamping mengkonsumsi, industrinya bersifat mandiri karena bisa memproduksi barang modal sendiri, dan keuntungan tetap di negara pusat. Akibat yang lebih jauh adalah negara-negara berkembang (termasuk negara-negara Asia Tenggara) hanya memiliki kemampuan sebagai agen-agen kapitalisme global.

Pembangunan industrialisasi di negara-negara tersebut lebih bersifat semu (Yosihara Kunio: 1990).

Gambar 2



Sumber: Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Ada beberapa hal yang dapat dipelajari teori sistem dunia. Pertama, memberikan pemahaman lebih jauh mengenai adanya ketimpangan yang inheren di dalam struktur perekonomian dunia. Kedua, teori ini juga menjelaskan mengenai logika perkembangan ekonomi yang tidak lepas dari inovasi dan akumulasi modal. Ketiga, dapat dipahami kompleksitas sistem perekonomian dunia yang rentan terhadap berbagai kontradiksi dan konflik kepentingan. Keempat, teori ini juga memberikan pemahaman bahwa perekonomian dunia lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada pemerataan Blomstorms & Hettne, 1984, 51-52).

Rezim Perdagangan Bebas

Demikian halnya dengan liberalisasi perdagangan dunia, yang nota bene sudah menjadi jargon utama sistem dunia, maka rezim ekonomi internasional seperti IMF, IBRD, dan WTO merupakan penentu bagi posisi negara-negara dalam sistem dunia. Peranan rezim

internasional sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari negara-negara industri maju (terutama mereka yang tergabung dalam EC, OECD, dan G-8) kaitannya dengan pembangunan di negara-negara berkembang, karena negara-negara tersebut berada pada posisi yang paling kuat.

Penciptaan sebuah rezim perdagangan bebas oleh AS pasca perang merupakan tindakan sadar dari kebijakan negara. Scott Burchill lebih jauh menjelaskan bahwa AS bangkit dari Perang Dunia II dengan kekuasaan yang lebih besar dan dalam posisi yang belum pernah dialami sebelumnya untuk merekonstruksi sistem ekonomi dunia, sehingga orang AS bisa berdagang, bekerja, dan mendapat keuntungan berlipat-ganda di mana-mana. Langkah ini berarti menciptakan sebuah ekonomi dunia yang kondusif bagi gerakan barang, modal, dan teknologi secara bebas (Scott Burchill dan Andrew Linklater: 2009, 71-72).

Pembentukan G-20 cenderung dipandang sebagai ruang antara kekuatan kapitalis dengan negara berkembang. Negara kapitalis hanya akan 'menolong' kelas elit yang berkuasa di negara berkembang tersebut untuk menjadi komprador. Sehingga negara kapitalis akan mendapatkan kekayaan dengan mengeksploitasi negara berkembang. Oleh karena itu, krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh gagalnya sistem kapital di AS yang menyebabkan kebangkrutan ekonomi negaranya, dapat dipahami bahwa ketika ada peluang spekulasi maka akibatnya harus ditanggung oleh negara berkembang seperti Indonesia (<http://awigra.Blogspot.com>). Dengan kata lain, keterlibatan Negara berkembang dalam forum seperti G-20 hanya akan memfasilitasi kepentingan negara kaya untuk lebih mengeksploitasi sumber daya milik negara berkembang. G-20 adalah ruang kooptasi para elite negara berkembang.

Rezim Meneter: Hegemoni Negara-negara Maju

Dalam perkembangannya hegemoni negara-negara maju atas negara-negara berkembang terlihat dalam aktivitas pertukaran moneter internasional, dimana sebagian besar pembayaran yang dilakukan oleh negara-negara berkembang harus menggunakan mata uang utama dunia-Dollar AS, Mark Jerman dan Yen Jepang-daripada mata uang mereka sendiri. Akibatnya, dalam menyusun kebijakan moneternya negara berkembang diharuskan melihat fluktuasi yang terjadi pada mata uang utama dunia tersebut sebagai sesuatu yang *given* (Hadiwinata: 2002, 177-178).

Menguat dan melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara di belahan dunia ternyata sangat bergantung pada nilai tukar mata uang dollar AS. Disini pula tampak letak ketergantungan dalam sistem ekonomi global yang pada akhirnya menciptakan pola ketimpangan “permanen”. Pengintegrasian sistem ekonomi dunia yang kemudian menghasilkan ketimpangan permanen itu berdasar pada kuatnya mata uang dollar yang tidak pernah tertandingi oleh mata uang negara-negara lain, malah sebaliknya, negara-negara itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan nilai tukar mata uangnya sendiri ketika dollar mengalami pasang surut.

Kemungkinan adanya pengaruh mekanisme moneter global terhadap sistem perbankan bisa saja dibenarkan, karena pada dasarnya uang tak ubahnya diperdagangkan seperti barang atau jasa, bahkan pasar uang lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan dengan pasar komoditi. Dengan kata lain, kuantitas permintaan dan penawaran dapat diketahui secara langsung. Sebaliknya, pasar uang tidak memungkinkan untuk mengendalikan informasi yang diperlukan oleh pembeli dan penjual. Pasar uang memiliki karakter informasi yang tidak menentu, karena indikator kualitas produk finansial tidak bisa diprediksi secara tepat. Akibatnya, harga sering menyesatkan. Oleh karena itu, peminjam suatu ketika harus melakukan pembayaran tingkat suku bunga tinggi, dan pada saat yang bersamaan yang

memberi pinjaman tidak akan bersedia memberi bantuan karena resiko yang tinggi yang harus ditanggung oleh peminjam.

Pertemuan 44 negara pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods merupakan cerminan dari keinginan untuk membentuk rezim moneter internasional. Guna menghindari kehancuran tata moneter seperti yang terjadi pada era 1930-an, para delegasi ketika itu menghasilkan suatu kesepakatan sistem moneter ketat atau terkendali (*fixed exchanged rate*), yang akan dijalankan sepenuhnya oleh IMF (Harold James: 1996, 588).

Tentang bagaimana pengelolaan dan sejumlah aturan yang akan diberlakukan pada rezim moneter internasional itu, baik Inggris maupun AS, kedua negara industri tersebut harus melewati perdebatan sengit. Perdebatan itu terjadi di Bretton Woods dengan perwakilan masing-masing; John Meynard Keynes dari Inggris dan Harry Dexter White dari AS.

Gagasan yang dikemukakan Keynes adalah mendorong; (1) pembentukan internasional “*clearing house*” yang didasarkan pada pemusatan transaksi mata uang melalui bank sentral; (2) pembentukan aset cadangan baru yang disebut “*bancor*” (cikal-bakal SDR’ s yang kemudian diberlakukan oleh IMF); (3) penyesuaian ketidakseimbangan nilai tukar sehingga negara kreditor menanggung beban negara debitor; (4) kredit diberikan kepada negara peminjam secara otomatis. Pendapat ini kemudian mendapat penentangan dari White. Ia menekankan pada; (1) Restorasi pasar yang kompetitif dengan campur tangan terbatas oleh pasar-pasar pusat untuk mempengaruhi nilai tukar; (2) Standar emas yang diperkuat oleh dana stabilisasi (IMF); (3) peminjam diberikan dengan syarat-syarat yang ketat (Robert A. Isaak: 1995, 57).

Akhirnya, pertentangan ini dimenangkan oleh pihak AS yang menggambarkan kuatnya dominasi AS pasca PD II, karena negara itulah yang memiliki kekuatan politik, ekonomi dan militer. Suatu kondisi yang kemudian mendorong AS untuk menghimbau

negara-negara agar mendukung pelaksanaan tata moneter internasional di bawah koordinasi IMF demi terwujudnya tata ekonomi dunia yang liberal.

Upaya-upaya AS dalam mendorong pelaksanaan tata moneter internasional tampak pada kontribusinya yang sangat besar terhadap rezim tersebut. Ambisi negara itu terbukti dengan bantuan finansialnya sebesar US\$ 3 juta terhadap lembaga moneter itu (Joan Edelman Spero: 1985, 46). Singkatnya, AS berhasil menciptakan cetak biru bagi pertumbuhan ekonomi yang non-inflasioner yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran dan mengembalikan nilai tukar yang kompetitif dalam rezim moneter internasional. Kelemahan fatal, yang akhirnya melumpuhkan sistem tersebut, sebab, segala sesuatunya didasarkan pada asumsi bahwa dominasi dollar selamanya bisa dikonversikan secara bebas menjadi emas.

Demikian, awal tahun 1960-an dan menjelang tahun 1970-an pondasi sistem Bretton Woods ini mengalami kehancuran. Sebagian besar pendapat mengemukakan bahwa posisi neraca pembayaran AS yang mengalami defisit, perkembangan kompetisi dalam ekonomi dunia, kebijakan politik luar negeri. AS dalam membiayai perang Vietnam, meningkatnya harga minyak yang ditetapkan oleh negara-negara OPEC (*organization of Petroleum Exporting Countries*), dan tingginya inflasi merupakan komponen-komponen penyebab hancurnya tata moneter yang dibentuk pada pertemuan Bretton Woods.

Sebenarnya, dengan sejumlah perubahan kebijakan, IMF mendominasi sistem moneter internasional dari tahun 1947 sampai dengan 1970. Salah satu perubahan terpenting adalah ditetapkannya sistem emas dua-deret pada tahun 1968 dan diciptakannya SDR' s (*Special Drawing Rights*) pada tahun 1970. Keduanya dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan moneter akibat menurunnya cadangan finansial internasional ditengah melonjaknya perdagangan internasional. Pembentukan dua mekanisme tersebut patut dikritisi, sebab pembentukannya lebih diprioritaskan untuk melindungi penawaran emas AS. Sementara kemampuan negara itu mulai terdesak ketika banjir di Eropa memelipatgandakan

tingkat permintaan akan emasnya. Namun, posisi dollar dalam rezim moneter internasional tetap menempati posisi yang tidak tertandingi.

Dengan segala keterbatasan IMF sebagai rezim moneter internasional, sistem mata uang ketat dipandang gagal dalam mengelola tata moneter internasional. Pada tahun 1971 ekonomi global mengalami serangkaian perubahan struktur dimana perekonomian negara-negara Eropa dan Jepang telah pulih sepenuhnya dari kerusakan akibat perang. Krisis ini kemudian dibahas oleh anggota-anggota IMF yang menghasilkan perjanjian *Smitsonian*. Sistem nilai tukar uang ketat dihapus dan diganti dengan sistem nilai tukar mengambang. *In placed of fixed convertibility, a new system, on off "free floating" currency relation, was established . Here the value of a country' s currency was basically left to suplay and demand* (Stephan D. Krasner: 364).

Itu sebabnya, sebagian besar pendapat mengatakan bahwa tata moneter dengan kurs mengambang mengisyaratkan semua negara mengejar tujuan domestiknya menurut kehendaknya sendiri-sendiri dan kurs mata uang mereka dalam ekonomi dunia ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap berbagai mata uang di pasar uang dunia.

Jelasnya, dollar tidak lagi memiliki nilai tetap terhadap emas, mekanisme pasar merupakan penentu bagi setiap kekuatan mata uang suatu negara. Karena itu, dollar suatu ketika bisa mengalami penurunan nilai, pada saat yang lain nilainya dapat meningkat tajam. Masalahnya adalah mata uang suatu negara yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, masing-masing mempunyai dampak positif dan negatif bagi negara bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mencegah kekacauan ekonomi domestiknya, pemerintah berbagai negara sering mencoba mengelola kurs mata uangnya dengan melakukan intervensi ke dalam pasar uang global.

IMF dan Konsekuensi yang Ditimbulkannya

Pada akhirnya, mekanisme dasar dari kapitalisme ekonomi dunia berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada suatu struktur politik yang mengikat, sehingga memungkinkan para produsen untuk melakukan akumulasi kapital akibat dari nilai-nilai kompetisi di mana para pelaku ekonomi bertindak semata-mata di atas prinsip yang normatif belaka. Artinya para produsen dan pengusaha cenderung membuat keputusan terhadap produksi dan investasi mereka dalam skala yang dapat mengoptimalkan keuntungan individu, demikian penjelasan Wallerstein mengenai masa depan ekonomi dunia (Wallerstein: 1984, 274).

Persepsi di atas, pada dasarnya berangkat dari persoalan menyangkut otoritas IMF sebagai rezim moneter kaitannya dengan perubahan konvertibilitas dollar, yang selanjutnya melahirkan sistem kurs mengambang. Hal ini tentu harus ditaati semua negara, termasuk Indonesia. Sementara itu, ada suatu pertanyaan yang mesti diajukan. Ketika pemberlakuan sistem kurs mengambang dalam rezim moneter, mengapa semua mata uang tidak mempunyai nilai yang sama. Bahkan pada saat dollar yang beredar di negara-negara lain sudah melebihi cadangan emas AS, dollar tetap dan bahkan tidak pernah sejajar dengan mata uang lainnya, apa lagi berada di bawah.

Demikian, rezim moneter di bawah koordinasi IMF dalam hubungannya dengan sistem pengawasan ekonomi dunia memunculkan masalah antara lembaga perdagangan dunia (WTO) dan IMF itu sendiri. Menurut James, ada empat masalah yang menjadi isu utama (Harold James: 1996).

Pertama pengelolaan likuiditas global. Pertumbuhan sektor pasar swasta yang dramatis merupakan perkembangan utama pasca perang. Akibatnya, lembaga-lembaga moneter internasional tidak mampu menyediakan likuiditas. Pengaturan kerjasama antara negara-negara di bidang moneter merupakan perhatian utama IMF dengan dibantu oleh BIS (*Bank of International Settlement*). Munculnya fenomena pemberian pinjaman yang melewati batas nasional, penetapan peraturan yang berbeda, melemahnya pemberi pinjaman andalan.

(*Lender of last resort*), krisis finansial yang membutuhkan penyelesaian secara internasional merupakan rangkaian masalah-masalah utama dalam sistem moneter dunia.

kedua, kebijakan penyesuaian. Perkembangan industri dan peningkatan pendapatan negara-negara dari sektor swasta mengakibatkan IMF dan IBRD menutup masalah-masalah yang menyangkut perdagangan terhadap negara miskin. Oleh karena kedua lembaga itu memiliki fungsi yang berbeda, terutama IMF yang hanya menangani masalah moneter bukan pembangunan, seharusnya kedua “kembar siam” Bretton Woods itu tidak perlu melakukan diskriminasi terhadap sebagian negara-negara anggotanya kalau keberadaan ingin dikelola dengan lebih efektif.

ketiga, kepercayaan. Kerangka kebijakan yang stabil dalam menangani sistem keuangan internasional sangat dibutuhkan oleh semua negara anggota, yang nota bene lebih banyak digerakkan oleh negara-negara G-8.

Artinya, suatu keharusan yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan moneter melalui lembaga yang universal dalam kerangka IMF.

keempat, kebijakan perdagangan. Salah satu tujuan IMF adalah mendorong perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional. Proses pengawasan IMF terhadap kebijakan nilai tukar dan liberalisasi perdagangan mengalami “tumpang tindih” dengan WTO. Sebab, pokok hubungan antara lembaga-lembaga itu ketika didirikan, para pendiri WTO menemukan kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia guna mencapai hubungan yang kuat dalam kebijakan ekonomi global. Tetapi kebijakan tersebut dalam prosesnya tidak begitu sukses. Terbukti dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan, bahkan dikhawatirkan dapat berpengaruh secara global.

Oleh karena itu, pandangan Krugman tentang “Kegagalan” IMF dalam mengelola tata moneter internasional patut untuk dicermati. Dalam kerangka IMF terdapat dua tipe mata uang. *Pertama*, mata uang keras. Mata uang seperti ini di pandang sering menyebabkan krisis

karena IMF mendorong negara bersangkutan untuk melakukan devaluasi mata uangnya guna mempertahankan nilai tukar mata uang tersebut. *Kedua*, mata uang lunak. Terhadap tipe ini IMF dipandang terlalu jauh berkepentingan guna menstabilkan mata uang itu (Paul Krugman: 1998, 35-36).

Kedua tindakan itu justru tidak pernah meyakinkan bagi para investor. Selanjutnya, yang terjadi adalah pelarian modal (*capital flight*). Otomatis mengakibatkan penurunan kuantitas perputaran keuangan. Dan inilah yang dilakukan oleh Indonesia guna menanamkan kepercayaan. Demikian halnya dengan mata uang lunak, menyebabkan sejumlah perbankan hancur.

Yang terpenting dari kritik yang diajukan Krugman itu adalah bahwa IMF dalam setiap menyelesaikan krisis dalam suatu negara selalu melakukan pemotongan anggaran dan menaikkan pajak, yang justru memperburuk keadaan.

Akhirnya, ia memberi solusi yang ia sebut sebagai *plan B* (kritik di atas adalah *plan A*). Oleh karena persoalan yang paling krusial dari krisis moneter yang dihadapi suatu negara adalah pelarian modal oleh para investor, maka tidak ada jalan lain kecuali harus menerapkan sistem kurs terkendali (*exchange control*). Pandangan ini dapat dipahami, sebab, dengan melakukan kontrol maka para investor.

Penutup

Kecenderungan dan perkembangan global dapat dimaknai sebagai interaksi yang saling mempengaruhi satu negara dengan negara lain, tidak ada negara yang dapat menghindarinya. Sesungguhnya globalisme itu berintikan saling ketergantungan dan keterkaitan, atau interdependensi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain dan antara negara dengan negara lain. Interdependensi negara-bangsa yang dikemas dalam bingkai sistem ekonomi global telah memaksa negara-negara dengan kapabilitas yang relatif lemah untuk tunduk dalam irama dan aturan sistem raksasa tersebut.

Kenyataannya memang demikian bahwa kegiatan pembangunan di negara-negara pinggiran hanya melakukan ekspor dan mengkonsumsi barang-barang massal dan barang-barang mewah. Sedangkan di negara pusat, disamping mengkonsumsi, industrinya bersifat mandiri karena bisa memproduksi barang modal sendiri, dan keuntungan tetap di negara pusat. Akibat yang lebih jauh adalah negara-negara berkembang hanya memiliki kemampuan sebagai agen-agen kapitalisme global. Pembangunan industrialisasi di negara-negara tersebut lebih bersifat semu.

Penciptaan sebuah rezim perdagangan bebas oleh AS pasca perang merupakan tindakan sadar dari kebijakan negara. AS bangkit dari Perang Dunia II dengan kekuasaan yang lebih besar dan dalam posisi yang belum pernah dialami sebelumnya untuk merekonstruksi sistem ekonomi dunia, sehingga orang AS bisa berdagang, bekerja, dan mendapat keuntungan berlipat-ganda di mana-mana. Langkah ini berarti menciptakan sebuah ekonomi dunia yang kondusif bagi gerakan barang, modal, dan teknologi secara bebas, hingga kemudian melahirkan kelompok G-20.

Dalam perkembangannya hegemoni negara-negara maju atas negara-negara berkembang terlihat dalam aktivitas pertukaran moneter internasional, dimana sebagian besar pembayaran yang dilakukan oleh negara-negara berkembang harus menggunakan mata uang utama dunia-Dollar AS, Mark Jerman dan Yen Jepang-daripada mata uang mereka sendiri. Akibatnya, dalam menyusun kebijakan moneternya negara berkembang diharuskan melihat fluktuasi yang terjadi pada mata uang utama dunia tersebut sebagai sesuatu yang *given*.

Pada akhirnya, mekanisme dasar dari ekonomi dunia berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada suatu struktur politik yang mengikat, sehingga memungkinkan para produsen untuk melakukan akumulasi kapital akibat dari nilai-nilai kompetisi di mana para pelaku ekonomi bertindak semata-mata di atas prinsip yang normatif belaka. Artinya para produsen dan

pengusaha cenderung membuat keputusan terhadap produksi dan investasi mereka dalam skala yang dapat mengoptimalkan keuntungan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia.
- A. Hasnan Habib, (1997). *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, Jakarta: CSIS.
- Bob Sugeng Hadiwinata, (2002). *Politik Bisnis Internasional*, Yogyakarta: Kanisius.
- Blomstroms, Magnus & Bjorn Hettne, (1984). *Development Theory in Transition, The Dependency Debate and Beyond: Third World Responses*, London: Zed Books Ltd.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater, (2009). *Teori-Toeri Hubungan Internasional*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Druker, Peter, (1992). "The Changed World Economy," dalam *The Frontiers of Management* New York : Harper and Row Publisher.
- Edelman Spero, Joan, (1985). *The Politics of Economic International Relations*, Boston: George Allen & Unwin.
- Isaak, Robert A. (1995). *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- James, Harold (1996). *International Monetary Cooperation Since Bretton Woods*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Krugman, Paul (1998). "Saving Asia: It's Time to Get Radical" , dalam *FORTUNE*, 7 September.
- Kunio, Yosihara (1990), *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Rourke, John T. (1989). "International Politics Regimes, Transactions and Change: Embed Liberalism in the Post-War economic Order" , dalam Stephan D. Krasner, *International Regimes*, London: Cornell University Press.
- Sukarna Wiranta (1997). "Kurs Rupiah Dalam Prespektif Ekonomi Internasional, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.V (20), Jakarta: LIPI.
- Kunio, Yosihara (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta LP3ES, 1990.

Wallerstein, Immanuel (1974), *Modern World-system, Vol.I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteen Century*, New York: Academic Press.

_____(1984),“ The Future of World Economy: A World System Perspective” , dalam Charles W. Kegley Jr. And Eugene R. Wittkopf, *The Global Agenda: Issues and Perspective*. (New York: Random House, Inc.).

“ Jeratan Perjanjian Perdagangan Bebas” , *Institute for Global Justice*, <http://www.globaljustice.org>. Diakses pada tanggal 19 April 2010.